

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693092/2026**

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 - 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 - 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 - 4. Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
 - Sebesar : Rp. 4.342.821.000 (EMPAT MILIAR TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	4.342.821.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 4.342.821.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

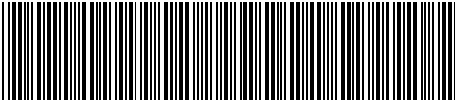
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2026

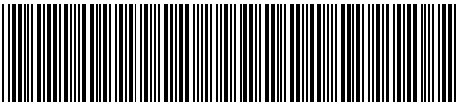


DS:4568-8031-7006-0193

Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	38.301.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	38.301.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	4.304.520.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	4.304.520.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2026
I A. INFORMASI KINERJA



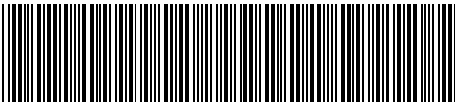
DS:4568-8031-7006-0193

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi				38.301.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah				38.301.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	38.301.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah	1.00	Rekomendasi Kebijakan	38.301.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				4.304.520.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah				4.304.520.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi				
		2. 01	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan				
		3. 01	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	26.660.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	1.00	Lembaga	26.660.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	300,00	Orang	29.680.000
Rincian Output	:	01	BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah	300.00	Orang	29.680.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	52,00	Lembaga	86.540.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah	52.00	Lembaga	86.540.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4568-8031-7006-0193

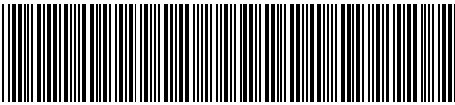
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data	32.120.000
Rincian Output		:	01	BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah	1,00	Data	32.120.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		424,00	Orang	3.392.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	424,00	Orang	3.392.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		56,00	Kelompok Masyarakat	597.520.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	56,00	Kelompok Masyarakat	597.520.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	140.000.000
Rincian Output		:	01	QDB.001	Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (PN)	1,00	Lembaga	140.000.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2026
I B. SUMBER DANA



DS:4568-8031-7006-0193

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	4.342.821.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	4.342.821.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

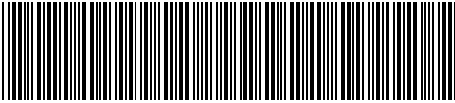
No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DS:4568-8031-7006-0193

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kewenangan : (KD)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



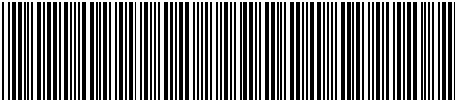
DS:4568-8031-7006-0193

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	29.680	-	-	-	29.680	139	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	86.540	-	-	-	86.540	01 . 55	
01 RM		-	86.540	-	-	-	86.540	139	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	32.120	-	-	-	32.120	01 . 55	
01 RM		-	32.120	-	-	-	32.120	139	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	3.392.000	-	-	-	3.392.000	01 . 55	
01 RM		-	3.392.000	-	-	-	3.392.000	139	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	597.520	-	-	-	597.520	01 . 55	
01 RM		-	597.520	-	-	-	597.520	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4568-8031-7006-0193

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kewenangan : (KD)

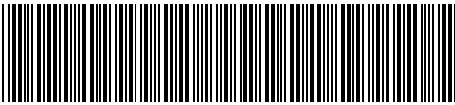
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	140.000	-	-	-	140.000	01 . 55	
	01 RM	-	140.000	-	-	-	140.000	139	
JUMLAH		-	4.342.821	-	-	-	4.342.821		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4568-8031-7006-0193

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

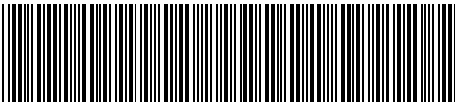
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693092	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	17.030	16.490	393.716	324.650	276.311	827.026	490.255	292.425	323.190	157.417	163.550	1.060.760	4.342.821
	135.11.BB.7133	BELANJA BARANG	17.030	16.490	393.716	324.650	276.311	827.026	490.255	292.425	323.190	157.417	163.550	1.060.760	4.342.821
		Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	0	4.625	0	23.101	3.525	3.525	3.525	0	0	0	0	38.301
	135.11.BF.7136	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	4.625	0	23.101	3.525	3.525	3.525	0	0	0	0	38.301
		Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	17.030	16.490	389.091	324.650	253.210	823.501	486.730	288.900	323.190	157.417	163.550	1.060.760	4.304.520
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	17.030	16.490	389.091	324.650	253.210	823.501	486.730	288.900	323.190	157.417	163.550	1.060.760	4.304.520

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2026
IV A. B L O K I R



DS:4568-8031-7006-0193

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693092] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

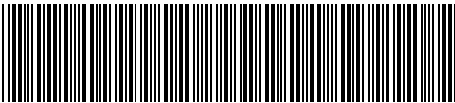
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2026
IV B. C A T A T A N



DS:4568-8031-7006-0193

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693092] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001